

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan sering terjadi di Negara berkembang sebagaimana kita bangsa Indonesia salah satunya. Program pengentasan kemiskinan di Indonesia menjadi program prioritas dalam pemerintahan. Menurut world bank kemiskinan adalah hidup dengan pendapatan dibawah 2 dollar per hari. Kemiskinan sering terjadi di pedesaan (12,86%) daripada perkotaan (6,69%) (www.bps.go.id), rendahnya pendidikan menyebabkan penurunan dalam segi sumberdaya manusia, serta kurangnya akses terhadap ruang publik menjadi penyebab kemiskinan di pedesaan. Berbagai upaya pemerintah untuk mengurangi kemiskinan sebenarnya sudah banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan untuk mendompleng dan menggerakkan ataupun membangun ekonomi pedesaan agar terentaskan dari kemiskinan. Antara lain melalui pemberian bantuan Raskin (beras miskin), PNPM, Dana BOS dan BLSM akan tetapi beberapa upaya ini dinilai kurang efektif untuk mengentaskan kemiskinan.

Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah merupakan pemerintah yang mempunyai kewenangan yang sangat strategis dan kedudukan yang strategis hal ini berkaitan dengan fungsinya selaku “pelayanan publik” guna meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, keadilan dan ketenteraman bagi masyarakat. Sebab perencanaan pembangunan daerah adalah suatu kegiatan untuk dilaksanakan dimasa depan dalam hal ini berawal dari tahapan-tahapan proses penyusunan program dan aktivitas yang melibatkan berbagai elemen didalamnya, demi pemanfaatan dan pengalokasian sumber-daya-sumber daya yang ada dengan tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dalam suatu lingkungan atau wilayah yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu. Riyadi & Bratakusamah (2004: 8).

Dalam pengertian ini pemerintah daerah sebagai peran perencana untuk mendesain dan membentuk interaksi dalam suatu proses menuju sasaran yang ingin dicapai. Dengan ini pemerintah harus berperan utama dengan tugas pokok dan fungsinya pemerintah daerah dan menyesuaikan dengan fungsi visi, misi, sasaran dan tujuan yang diterapkan. Sedangkan berkaitan dengan pengertian ini maka, Soemendar (1985:1) dalam (Sayafie 2011:8) bahwa, pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti memperhatikan ketenteraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi, sebagian dari fungsi utama pemerintahan daerah yang terutama adalah memperbaiki dan menyelesaikan tuntutan/aspirasi masyarakat.

Ndraha (1987 : 110) menyatakan bahwa peranan pemerintah dalam pembangunan masyarakat amat luas, berawal dari hal yang bersifat pelayanan operasional sampai pada hal yang bersifat ideology dan spiritual dengan ini peran pemerintah akan mempunyai wewenang dan kemampuan seseorang tersendiri untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seorang pemimpin, karena tuntutan dari tugas pokok dan fungsinya sendiri bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dilingkungan masyarakat maupun pemerintah.

Rasyid (2000 : 48) menyampaikan bahwa pelaksanaan pemerintahan yang baik selalu berpatokan pada tugas pokok dan fungsi yang diatur oleh peraturan yang ditentukan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tergantung pihak pemimpinnya sendiri. Dalam hal ini kegiatan yang harus dilaksanakan / dijalankan terdapat tiga fungsi yang hakiki yaitu : pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development).” dalam hubungan tersebut menegaskan bahwa, pelayanan yang baik akan membuahkan keadilan bagi masyarakat bangsa dan negara, sedangkan pemberdayaan

adalah mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran dalam masyarakat.

Pada penelitian kali ini penulis ingin mengangkat peran pemerintah dalam membangun sumberdaya pada masyarakat terbelakang “tunagrahita”. “Tunagrahita” adalah istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata (Somantri, 2006). Disamping itu mereka mengalami keterbelakangan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mereka kurang cakap dalam memikirkan hal-hal yang abstrak, yang sulit-sulit, dan yang berbelit-belit (Moh.Amin). Desa Karangpatihan merupakan salah satu wajah potret buram kemiskinan, meski hanya berjarak 23 km dari Ponorogo. Posisi desa diapit oleh empat gunung kapur yang gersang. Sebelah selatan berdiri Gunung Prongos, di barat ada Gunung Lumbang dan Rajegwesi, serta sebelah utara Gunung Bangkong (Statistik, 2016).

Kondisi gersang dan susah air irigasi membuat tanah desa tak subur. Hanya ketela dan sejenisnya yang bisa tumbuh. Bila musim kemarau, yang terlihat di kanan-kiri adalah bebukitan yang panas meranggas. Kondisi alam yang tandus membuat warganya kekurangan gizi. Bahkan, terdapat puluhan penderita tunagrahita. Munculnya sebutan Kampung Idiot pertama kali pada tahun 2008, dari pemberitaan melalui berbagai media cetak maupun elektronik yang salah satu wartawan juga mahasiswa yang waktu itu diajak untuk meliput aktivitas masyarakat tunagrahita. Sebutan itu tidak hanya dikenal oleh masyarakat sekitar desa saja, melainkan sampai masyarakat luas. Hal ini memang tidak bisa di pungkiri lagi, karena jika kabar tersebut masuk dalam media cetak maupun elektronik maka kalangan masyarakat yang jauh dari Desa Karangpatihanpun dapat mengetahuinya (2013).

Dengan sebutan Kampung “Idiot” Desa Karangpatihan maka pemerintah desa maupun daerah harus berupaya untuk menghilangkan sebutan tersebut dengan cara memberikan pemberdayaan terutama untuk meningkatkan kualitas gizi dan juga pendidikan untuk masyarakat dengan keterbelakangan mental, supaya dikemudian hari tidak ada kelahiran anak atau masyarakat dengan menderita keterbelakangan mental. Pemberdayaan yang dilakukan di desa Karangpatihan dalam rangka memberi keahlian warga tunagrahita serta mengurangi jumlah kemiskinan diantaranya adalah dengan pembuatan kerajinan keset, pembuatan kerajinan tangan tasbih, ternak lele, ternak kambing, dan industri batik ciprat yang sudah di distribusikan ke beberapa kota di Indonesia.

Hal tersebut tentunya akan membentuk suatu badan usaha yang berperan dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Upaya pemberdayaan tersebut dilakukan pemerintah untuk memandirikan warga tunagrahita. Agar mereka tidak lagi bergantung terhadap orang lain ataupun bantuan konsumtif dari warga asing serta kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Pelatihan program pemberdayaan dilakukan di Rumah Harapan Karangpatihan Bangkit, diikuti oleh warga tunagrahita dan dalam pendampingan pelatih. Sosiopreanurship yang dilakukan baiknya akan menjadi terapi social dan pengangkat perekonomian para penyandang tuna grahita pada umumnya.

Desa Karangpatihan Balong Ponorogo Memiliki tokoh social entrepreneur yaitu Eko Mulyadi. Menurut Ipong Muchlissoni selaku Bupati Ponorogo di acara The Nation Metro TV mengatakan bahwa, Eko Mulyadi dikatakan sebagai tokoh social entrepreneur karena sosoknya yang berjiwa sosial tinggi dan peduli terhadap sesama. Misalnya di Desa Karangpatihan Balong, Eko Mulyadi memberdayakan masyarakat Desa Karangpatihan karena melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat sangat memprihatinkan.

Sebelum pemberdayaan yang dilakukan oleh Eko Mulyadi, masyarakat Desa Karangpatihan khususnya masyarakat tunagrahita kondisinya sangat memprihatinkan dan hanya mengandalkan ekonominya pada tanah kapur yang tandus dan bantuan secara konsumtif dari pemerintah maupun donatur. Kondisi masyarakat Desa Karangpatihan khususnya masyarakat tunagrahita yang di bawah garis kemiskinan serta Mereka dalam memenuhi kebutuhannya mengandalkan bantuan konsumtif dari donatur dan khususnya program-program pemerintah di wilayah Kabupaten Ponorogo. Puncaknya jika mereka tidak memiliki bantuan, dan kehabisan bahan makanan untuk digunakan sehari-hari, maka mereka akan kembali mengkonsumsi jagung dan singkong (gaplek). Sehingga, dengan adanya pemberdayaan dari Eko Mulyadi terhadap masyarakat Desa Karangpatihan khususnya masyarakat tunagrahita, mereka dapat mempunyai pendapatan rutin dan mampu memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari.

PERMENDES PDTT no 21 th 2020 pasal 1 ayat 5 & 6 Mengamanatkan Bahwasannya “Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.” Serta “Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.” Untuk itu eko mulyadi mempunyai hak untuk mengambil kebijakan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tunagrahita yang ada di kampung mereka. Hal ini bisa dijadikan payung hukum untuk mencapai kemufakatan dalam menjalankan kebijakan yang sudah dijalankan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji kebijakan Sosiopreanurship dalam peningkatan kesetaraan ekonomi Masyarakat penyandang Tunagrahita di Desa Karang Patihan Kec Balong Kab Ponorogo. Penulis dalam penelitian ini mengambil judul: **KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA KARANGPATIHAN DALAM PENANGANAN MASYARAKAT PENYANDANG “TUNAGRAHITA” DENGAN PENDEKATAN SOCIOPREANURSHIP**



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan tersebut, maka pertanyaan penelitian yang di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kebijakan Pemerintahan desa Karangpatihan yang diambil sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat penyandang Tunagrahita ?
2. Bagaimana cara *Sosiopreanurship* mampu mengangkat perekonomian masyarakat penyandang Tunagrahita di Desa Karangpatihan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji apakah kebijakan yang diambil oleh pihak Pemerintah desa Karangpatihan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat penyandang Tunagrahita.
2. Untuk mengetahui cara *Sosiopreanurship* mengangkat perekonomian masyarakat penyandang Tunagrahita di Desa Karangpatihan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pemerintah serta ilmu lain yang terkait dengan hasil penelitian ini. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan perbandingan pada masa mendatang.
2. Secara praktis memberi masukan kepada pihak pemerintah daerah setempat dalam kebijakan pengelolaan *Sosiopreanurship* yang diambil oleh pemerintahan desa Karangpatihan.

E. Landasan Teori

1. Peran Pemerintah dalam Pembangunan

Peranan pemerintah sebagai fasilitator, Riyadi dan Bratakusuma (2003:6) perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tapi tetap berpegang pada azas prioritas. Peranan pemerintah daerah untuk memfasilitasi program perencanaan pembangunan daerah terpadu perlu melibatkan partisipasi masyarakat populer di sebut *Bottom up Planning* (perencanaan dari bawah) ketrlibatan masyarakat langsung berkaitan dengan slogan Negara demokratis yaitu perencanaan sampai pada masyarakat yang paling bawah. Pembahasan ini peneliti simpulkan dari beberapa teori dan hasil penelitian lapangan tentang peranan pemerintah daerah sebagai fasilitator yaitu, pelaksanaan program pemerinthan harus sesuai dengan sarana dan prasaran

2. Kebijakan Pemerintah Desa

Pasal 1 Permendagri No.1 Tahun 2018 mengatakan bahwa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.” (Permendes, 2018)”

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Pasal 10 no.1, Permendes, (2018) menyatakan bahwa, Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumber dayanya sendiri.”

Dengan adanya beberapa pernyataan dari ketiga pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa nyatanya dana desa harus diprioritaskan demi kepentingan masyarakat banyak, khususnya masyarakat desa. Pun dengan pengelolaan sumber daya yang ada, pemerintah pusat berharap bahwa desa dapat mandiri dan bias menswa kelola potensi-potensi mereka. Wewenang ini diberikan bukan semata-mata hanya untuk memperkaya satu pihak, atau yang sering kita dengar dengan sebutan “yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin”. Pengelolaan dana desa harus transparan demi terwujudnya cita-cita bangsa yang bebas dari korupsi, konklusi dan nepotisme. Dengan demikian harapan saya sebagai penerus bangsa Indonesia kedepannya lebih peduli dengan kesejahteraan masyarakat kecil di pedesaan.

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurut Adisasmita (2013) ada 4 strategi pembangunan yang dapat diaplikasikan demi mewujudkan tujuan pembangunan pedesaan, diantaranya:

a. Strategi Pertumbuhan

Strategi pertumbuhan umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam menilai ekonomis melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktivitas sektor pertanian, permodalan, kesempatan kerja dan peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat pedesaan.

b. Strategi Kesejahteraan

Strategi kesejahteraan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup atau kesejahteraan penduduk pedesaan melalui pelayanan dan peningkatan program-program pembangunan sosial yang berskala besar atau nasional, seperti peningkatan pendidikan, perbaikan kesehatan dan gizi, penanggulangan urbanisasi, perbaikan permukiman penduduk, pembangunan fasilitas transportasi, pembuatan prasarana dan sarana sosial lainnya.

c. Strategi Tanggap Terhadap Kebutuhan Masyarakat

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan dari pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi dan tersedianya sumber daya yang sesuai kebutuhan di pedesaan.

d. Strategi Terpadu Dan Menyeluruh

Strategi terpadu dan menyeluruh ini ingin mencapai tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat simultan dalam proses pembangunan pedesaan.

Dengan memadupadankan keempat strategi yang telah dirumuskan oleh adimasta maka akan tercipta sebuah kesinambungan dan keakuratan dalam membuat strategi pelaksanaan pembangunan pedesaan. Karena jika tanpa aspek keempat yaitu terpadu dan menyeluruh maka akan tercipta sebuah gabs atau jarak dalam masyarakat. Inilah yang menyebabkan ketimpangan sosial di lini masyarakat pedesaan.

4. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat dan atau mengoptimalkan keberdayaan (dalam arti kemampuan dan atau keunggulan bersaing) kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai proses, pemberdayaan merujuk pada kemampuan, untuk berpartisipasi memperoleh kesempatan dan atau mengakses sumberdaya dan layanan yang diperlukan untuk memperbaiki mutu hidupnya (baik secara individual, kelompok, dan masyarakatnya dalam arti luas). Dengan pemahaman seperti itu, pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses terencana untuk meningkatkan skala/*upgrade* utilitas dari obyek yang diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri (Totok M, 2012).

Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan, (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian (Winarni, 1998). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan dikembangkan.

Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

5. Tunagrahita

Tunagrahita merupakan gangguan atau hambatan yang dialami seseorang dalam perkembangan daya pikir maupun kepribadian, sehingga tidak mampu hidup sendiri dalam masyarakat (membutuhkan pendampingan) (Munzayanah, 2000). Pendapat lain mengatakan, tunagrahita adalah seseorang yang memiliki kecerdasan dibawah rata-rata orang pada umurnya dan mengalami hambatan penyesuaian diri dengan lingkungannya (Apriyanto, 2012).

Pengelompokan tunagrahita menurut Novan Ardy Wiyani adalah tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, tunagrahita parah. Tunagrahita ringan adalah yang mampu didik meskipun hasilnya tidak maksimal. Orang tersebut dapat didik dalam bidang akademiknya seperti membaca, menulis, mengeja, dan berhitung, dapat menyesuaikan diri dan tidak bergantung pada orang lain, dapat memiliki keterampilan sederhana untuk kepentingan kerja dikemudian hari. Tuna grahita sedang adalah anak yang memiliki kisaran IQ 54-40. Mereka memiliki kisaran IQ dibawah tunagrahita ringan sehingga tidak mungkin mampu mengikuti program yang diperuntukkan bagi anak tunagrahita ringan. Beberapa kemampuan yang perlu diajarkan pada anak tunagrahita sedang yaitu anak belajar mengurus diri sendiri, misalnya makan, memakai pakaian, mandi, tidur, dan lainnya. Anak juga dapat diajarkan dengan penyesuaian diri di lingkungan rumah dan sekitarnya. Juga dapat mempelajari kegunaan ekonomi dirumah atau di lembaga khusus (Wiyani, 2014).

Tuna grahita parah adalah yang memiliki kisaran IQ 24-0. Mereka memiliki IQ yang sangat rendah sehingga ia tidak mampu mengurus dirinya sendiri atau

bersosialisasi. Mereka membutuhkan orang lain untuk mengurus dirinya. Jadi tunagrahita parah ini memerlukan perawatan sepenuhnya sepanjang hidupnya.

6. *Sosiopreneurship*

Sosiopreneurship berasal dari kata Social (kemasyarakatan) dan Entrepreneurship (wirausaha). Sehingga sosiopreneurship memiliki pengertian sederhana adalah seseorang yang mengetahui dan mau mengerti permasalahan sosial dan menggunakan kemampuan kewirausahaannya untuk mengatur, membuat, dan mengelola suatu usaha guna melakukan serta membawa perubahan sosial, terutama dibidang kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan (Nicholls,2008).

Socialentrepreneurship adalah kombinasi dan semangat besar dalam misi sosial dengan disiplin, inovasi, dan keteguhan seperti yang lazim berlaku di dua bisnis. Socialentrepreneur menciptakan dan memimpin organisasi yang ditujukan sebagai katalisator perubahan sosial dalam tatanan sistem melalui gagasan baru, produk, jasa, metodologi, dan perubahan sosial.

F. **Definisi Operasional**

Kebijakan pemdes Karangpatihan dalam penanganan masyarakat penyandang “tunagrahita” dengan pendekatan sociopreneurship dapat dilihat dan diukur melalui beberapa aspek :

1. kebijakan Pemerintahan desa Karangpatihan dengan kebutuhan masyarakat penyandang Tunagrahita
 - a. PERMENDES No 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai kiblat pelaksanaan kebijakan bagi daerah tertinggal seperti di pedesaan.
 - b. APBDes sebagai salah sumberdana yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan Manusia yang ada di Desa Karangpatihan.

- c. Musyawarah Bersama Warga Desa Sebagai pengkrucutan tentang pelaksanaan dan kebijakan yang diambil dalam jangka waktu pendek menengah dan panjang
2. Cara Sosiopreanur mengangkat Kebutuhan masyarakat Tunagrahita
 - a. Jenis usaha berperan sebagai pencocokan jenis penggarap atau pelaksana oleh masyarakat itu sendiri, masyarakat dapat memilih jenis usahanya sendiri sesuai kemauan dan keinginan mereka.
 - b. Pelatihan dilakukan guna meningkatkan soft skill dalam mengembangkan dan menyempurnakan produk atau usaha yang sedang mereka jalankan
 - c. Terapi social adalah sebuah hal yang sangat penting guna menyamaratakan kesenjangan sumberdaya, dengan adanya sociopreanur yang mengedepankan kepentingan rakyatnya ini bisa menjadi terapi social bagi tunagrahita yang sebelumnya dikucilkan oleh warga desa.

G. MetodePenelitrn

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam hal ini adalah suatu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan pendekatan sociopreanurship terhadap masyarakat penyandang “tunagrahita” di Desa Karangpatihan Kec Balong Kab Ponorogo. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan interaksional atau mikro dengan analisis kualitatif yang selanjutnya dianalisis secara logis dan sistematis, serta dengan menggunakan metode kualitatif. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menerus menurut Mills dan Huberman (dalam Sugeng, 2006 : 53). Sedangkan metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986 : 250)

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini adalah diwilayah Desa Karangpatihan Kec Balong Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Dikarenakan banyak sekali pembelajaran tentang kebijakan yang benar-benar dilaksanakan sampai kepada hasil yang cukup

berampak pada masyarakat tertinggal seperti tunagrahita, untuk itu karangpatihan dengan penyandang tunagrahitinya dinilai memiliki nilai untuk dikaji dan diteliti mengenai konsep dan endekatan yang dilakukan pemerintahan desa karangpatihan.

3. Teknik penentuan Informan

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang memahami informasi tentang objek penelitian. Informan yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Terdapat kriteria-

kriteria untuk menentukan informan penelitian yang dikatakan oleh para ahli.

Dalam penentuan informan peneliti menggunakan metode *purposive sampling*. Penentuan informan dilakukan dengan cara memilih atau menentukan langsung jumlah informan sebanyak 3 orang. Informan dalam penelitian ini adalah kepala Desa KarangPatihan, Wakil Ketua Kelompok “Rumah Harapan” dan ketua Pemberdayaan Ekonomi “Rumah Harapan”. Alasan memilih informan karena orang- tersebut lebih paham dan mengetahuinya. Selain itu, mereka adalah sudah wakil dari Perangkat yang adadi dalamnya. Mereka juga merupakan orang yang berkompeten dari warga. Dalam bab ini Peneliti memaparkan beberapa bagian yang berkenaan dengan pendekatan sociopreanurship dalam pemberdayaan masyarakat penyandang tunagrahita di Desa Karang Patihan.

Adapun pemanfaatan informan bagi peneliti adalah agar dapat menemukan informasi dari informan yang satu dengan informan yang lain.

Penelitian mengenai pendekatan sociopreanurship dalam pemberdayaan masyarakat penyandang tunagrahita di Desa Karang Patihan memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Karangpatihan
2. Wakil Ketua “Rumah Harapan”
3. Kepala Devisi Pemberdayaan ekonomi “Rumah Harapan”.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

“Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan hal-hal lainnya yang dapat langsung diamati oleh peneliti. Jadi, dalam observasi peneliti melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian”. (Maolani dan Cahyana, 2015) Setelah mengetahui hal tersebut maka peneliti akan langsung mendatangi lokasi di desa Karangpatihan untuk melakukan tinjauan lapangan dan melihat program-program yang sudah dan sedang dijalankan oleh pemerintah desa Karangpatihan.

b. Wawancara

Wawancara Menurut Esterberg (dalam Sugiyono, 2016) “Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”

Wawancara terbagi menjadi tiga macam yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tak struktur. Dalam penelitian ini peneliti mengambil wawancara semi terstruktur, yaitu dengan menggali ide-ide serta pemaparan masyarakat desa dan lembaga pemerintahan desa yang terlibat, dengan pertanyaan yang telah ditentukan berdasarkan kebijakan pendekatan sociopreanurship dalam pemberdayaan masyarakat penyandang tunagrahita di Desa Karangpatihan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan upaya pengumpulan informasi yang berupa arsip-arsip yang tertulis ataupun catatan yang dimiliki oleh instansi, organisasi ataupun perorangan. Dokumentasi bisa berupa video, rekaman suara, gambar atau pun karya-karya. Dokumentasi menjadi hal yang penting dalam penelitian karena bisa menunjukkan bukti dari informasi yang ada dilapangan. Dengan adanya dokumentasi bisa menguatkan data ataupun informasi pada penelitian ini. peneliti akan mencari dokumentasi pendukung terkait kebijakan pendekatan sociopreanurship dalam pemberdayaan masyarakat penyandang tunagrahita di Desa Karang Patihan.

5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif pada dasarnya dikembangkan untuk memberikan makna (*making sense of*) terhadap data, menafsirkan (*interpreting*), atau mentransformasikan (*transforming*) data ke dalam bentuk-bentuk narasi yang kemudian mengarah pada temuan yang bernuansa proposisi-proposisi ilmiah (*thesis*) yang akhirnya sampai pada kesimpulan-kesimpulan final. Kunci pokok dalam analisis data kualitatif adalah menjawab pertanyaan *how did the researcher get to these conclusions from these data?* (bagaimana peneliti sampai pada kesimpulan- kesimpulan dengan bertolak pada data yang ada?) (Pawito, 2007 : 101).

Teknik analisis dan penafsiran data yang digunakan dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah yang direkomendasikan Miles dan Huberman (2014), yang lazim disebut dengan *interactive model*. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian kesimpulan.

a. Data Kondensasi

Miles dan Huberman (2014: 10) "*Data condensation refers to the process of selecting data, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data that*

appear in written-up field notes or transcriptions". Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian.

b. Penyajian Data

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Miles dan Huberman membatasi penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dimulai dengan proses mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan. Karena data dalam penelitian kualitatif biasanya beraneka ragam perspektif dan terasa bertumpuk, maka penyajian data pada umumnya diyakini sangat membantu proses analisis.

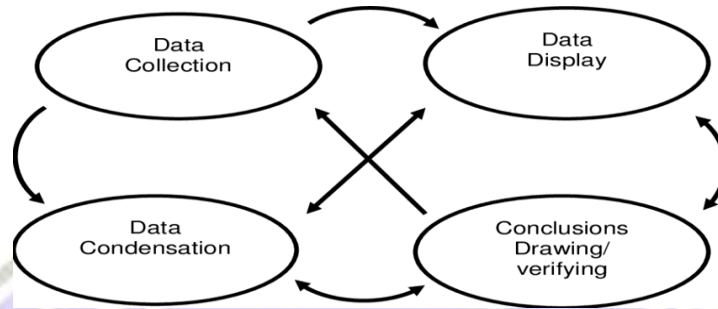
Dalam hubungan ini, data yang tersaji berupa kelompok-kelompok atau gugusan-gugusan yang kemudian saling dikait-kaitkan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Gambar-gambar dan diagram yang menunjukkan keterkaitan antara gejala satu dengan yang lain sangat diperlukan untuk kepentingan analisa data.

c. Penarikan dan Pengujian Kesimpulan

Pada komponen terakhir ini, peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau kecenderungan dari display data yang telah dibuat. Ada kalanya kesimpulan telah tergambar sejak awal, namun kesimpulan final tidak pernah dapat dirumuskan secara memadai tanpa peneliti menyelesaikan analisis seluruh data yang ada (Miles dan Huberman, 2014 : 16).

Dalam kaitan ini peneliti mengkonfirmasi, mempertajam, atau mungkin

merevisi kesimpulan-kesimpulan final berupa proposisi-proposisi ilmiah mengenai gejala atau realitas yang diteliti. Ketiga proses analisis data tersebut merupakan satu kesatuan yang saling menjelaskan dan berhubungan erat satu dengan yang lainnya. Hubungan ketiganya dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.1
Komponen Analisis Data : Model Interaktif Miles, Huberman dan Saldana

6. Validitas Data

Validitas (kesahihan) merupakan jaminan bagi kemantapan kesimpulan dan tafsir makna sebagai hasil penelitian. Validitas data akan membuktikan apakah hasil penelitian yang dilakukan peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Agar data hasil penelitian ini valid, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu, selanjutnya ditarik kesimpulan yang lebih mantap dan paling bisa diterima (H.B. Sutopo, 2002 : 78).

Dari empat macam teknik triangulasi yakni triangulasi data (disebut juga triangulasi sumber), triangulasi metode, triangulasi teori, dan triangulasi peneliti, **penelitian ini menggunakan triangulasi data, artinya, peneliti menggunakan berbagai macam sumber data agar data yang diperoleh teruji kemantapan dan kebenarannya.** Dengan demikian akan bisa didapatkan hasil penelitian yang teruji validitasnya serta dapat dipertanggungjawabkan apabila suatu saat diperlukan verifikasi. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teori.